

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS PARIWISATA YOGYAKARTA DENGAN
PENDEKATAN VALUE FOR MONEY**

(STUDI EMPIRIS PADA DINAS PARIWISATA YOGYAKARTA TAHUN 2017 DAN 2018)

Handika Damayanti Rahayu, Nugraheni Rintasari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Email: handikadamayanti97@gmail.com, skripsirinta@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is the Yogyakarta tourism place which is still a magnet for both domestic and foreign tourists. Tourist visits every year experience an increase with the support of the assumption that Indonesia is a safe and comfortable tourist spot as a vacation spot. The purpose of this study is to investigate the performance level of the Yogyakarta Tourism Office in 2017 and 2018 if it is measured in terms of economic aspects, efficiency, and effectiveness.

The method of data collection in this study is to take the data contained in the Yogyakarta Tourism Office, namely in the form of data from the Yogyakarta Tourism Agency's Performance Agency Report (LKIP) in 2017 and 2018. LKIP data for 2017 and 2018 are then calculated using formulas, measured by predetermined criteria, and analyzed. The results of this study indicate that the Yogyakarta Tourism Office in 2017 has carried out activities economically and very efficiently. In 2018 the Tourism Office shows increased performance in carrying out activities so that it is successful in running economically and very efficiently.

Outcome data are not yet available to the Tourism Office because the Work Plan (Renja) is included in the medium term for 5 years.

Keywords: level of performance, economy, efficiency, effectiveness

PENDAHULUAN

Bidang pariwisata Indonesia menjadi salah satu sektor tercepat pertumbuhannya dengan didukung anggapan bahwa Indonesia sebagai tempat berlibur yang aman dan nyaman. Indonesia sebagai tempat berlibur yang aman dan nyaman dibuktikan dengan banyaknya pengunjung baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Dikutip dari www.arahdestinasi.com tahun 2018 bahwasanya pertumbuhan pada sektor pariwisata dalam laporan *The World Travel and Tourism Council (WTTC)* 2018, Indonesia menempati nomor 9 dunia, nomor 3 ASIA, dan nomor 1 di ASEAN yang diungkapkan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Menurut Undang-undang No.9 tahun 1990 pasal 1 ayat (5) yang berisi “Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut”.

Bidang pariwisata Indonesia adalah salah satu sektor ekonomi terbesar dan diharapkan mampu

memutus kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan dengan cepat dan tepat (www.sindonews.com tahun 2017). Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan dalam Forum Merdeka Barat (FMB) bahwa devisa dari sektor pariwisata terus menunjukkan peningkatan sejak tahun 2015 (www.arahdestinasi.com tahun 2018).

Menurut Mahmudi (2015: 12-14) “pengukuran organisasi sektor publik digunakan untuk menilai kesuksesan organisasi. Masyarakat menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi untuk memberikan pelayanan publik yang murah dan berkualitas.

Dijelaskan dalam Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 bahwa “Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”. Kinerja dalam sektor publik sangat penting untuk dibahas karena kinerja tersebut sebagai bahan penilaian masyarakat kepada Aparatur Negara dalam menjalankan tugasnya apakah telah baik sesuai dengan aturan atau belum.

Pengukuran kinerja dalam sektor publik dapat dilakukan dengan *value for money* atau *balance*

scorecard. Pengukuran kinerja dengan *value for money* adalah untuk mengukur tentang ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi sedangkan jika dengan *balance scorecard* pengadopsian dari organisasi bisnis yaitu untuk meningkatkan kinerja melalui empat perspektif yaitu pelanggan, keuangan, proses internal, dan pertumbuhan pembelajaran menurut Mahmudi (2015: 83-151).

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga hal yaitu Apakah Kinerja keuangan Dinas Pariwisata Yogyakarta pada tahun 2017 dan tahun 2018 sudah ekonomis jika diukur dengan konsep *value for money*?, Apakah Kinerja keuangan Dinas Pariwisata Yogyakarta pada tahun 2017 dan tahun 2018 sudah efisien jika diukur dengan konsep *value for money*?, dan Apakah Kinerja keuangan Dinas Pariwisata Yogyakarta pada tahun 2017 dan tahun 2018 sudah efektif jika diukur dengan konsep *value for money*?

Dengan batasan hanya menganalisis dalam kurun waktu 2 tahun karena Dinas Pariwisata Yogyakarta sebelum tahun 2017 masih bergabung dengan dinas kebudayaan, sehingga data yang tersedia terbatas

dan Rencana kerja (Renja) yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Yogyakarta adalah Rencana Kerja jangka menengah yaitu dalam kurun waktu lima tahun terhitung sejak tahun 2017 sehingga data *outcome* belum tersedia pada tahun 2018.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan Dinas Pariwisata Yogyakarta pada tahun 2017 dan tahun 2018 jika diukur pada aspek ekonomi, untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan Dinas Pariwisata Yogyakarta pada tahun 2017 dan tahun 2018 jika diukur pada aspek efisiensi, dan untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan Dinas Pariwisata Yogyakarta pada tahun 2017 dan tahun 2018 jika diukur pada aspek efektivitas.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik. Halim dan Kusufi (2012: 3) “Akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi publik yang dijadikan sebagai suatu informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan”.

Analisis. Siswanto (2008: 10) “Analisis yaitu memisahkan sesuatu menjadi bagian

yang lebih kecil di suatu entitas dengan mengidentifikasi, membandingkan, menemukan hubungan berdasar parameter tertentu dengan upaya untuk menguji atau membuktikan kebenaran”.

Kinerja. Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Mahmudi (2010: 18-20) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja diantaranya: Faktor personil/individu, Faktor kepemimpinan, Faktor tim, Faktor sistem, dan Faktor kontekstual

Indikator Kinerja. Adisasmita (2010: 103-104) “Indikator kinerja dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok yaitu: Indikator masukan (*inputs*), Indikator keluaran (*outputs*), Indikator hasil (*outcomes*), Indikator manfaat (*benefit*), dan Indikator dampak (*impacts*).

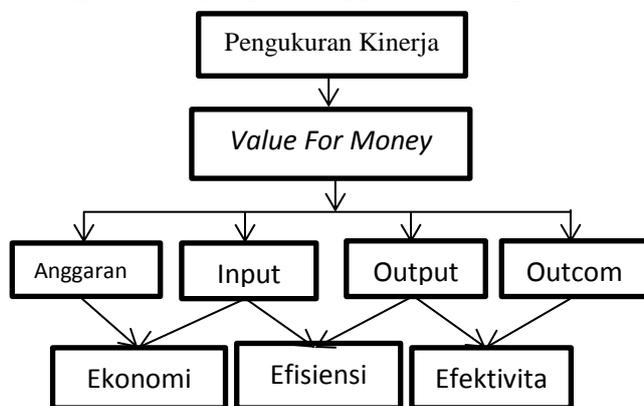
Pengukuran Kinerja. Adisasmita (2010: 33) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Value For Money. Halim (2014: 128) “*Value For Money* adalah konsep penting dalam organisasi sektor publik yang mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas sehingga sering disebut sebagai inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Mahmudi, (2010: 89) “mengemukakan bahwa adanya pengukuran dengan *Value For Money* adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan karena, *Value For Money* adalah kunci dari pengukuran kinerja sektor publik”.

Penelitian Terdahulu. Hasil penelitian dari Mulyaningtyas (2018) tentang Analisis Kinerja Keuangan Kota Mojokerto Dengan Pendekatan *Value For Money* menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BPPKA Kota Mojokerto pada tahun anggaran 2013 termasuk dalam kriteria cukup ekonomis, cukup efisien, dan sangat efektif. Pada tahun anggaran 2014 kriteria penilaian kinerja kuangannya cukup ekonomis, kurang efisien, dan tidak efektif. Tahun anggaran 2015, penilaian kinerja keuangan termasuk dalam kriteria cukup ekonomis, kurang efisien, dan sangat efektif dan penelitian dari Liando, Saerang dan Elim (2014) dalam penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan Metode *Value For Money*. Hasil kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dari segi

ekonomis dapat disimpulkan dalam mengoptimalkan anggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran, dari segi efisiensi harus lebih ditingkatkan lagi sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi terutama nominal anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, dan dari segi efektivitas dapat diperbaiki dengan peningkatan secara berkesinambungan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Model Penelitian. Kinerja instansi pemerintah dapat diukur dengan menggunakan pendekatan *Value For Money* (VFM), pendekatan ini mengukur dengan tiga indikator yaitu Ekonomi, Efisien dan Efektivitas. Ekonomi terkait dengan konsep biaya atau unit *input* yang berarti bagaimana mendapatkan sumber daya *input* dengan nilai atau harga rendah. Efisiensi terkait hubungan barang atau jasa (*output*) yang dihasilkan dengan *input* atau sumber daya yang digunakan. Efektivitas terkait hubungan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.



Sumber: Mulyaningtyas (2018)

Gambar 2.2

Rerangka pemikiran metode *Value For Money*

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka tentang target anggaran, realisasi anggaran, data anggaran belanja langsung, dan realisasi belanja langsung serta data hasil *outcome* program.

Teknik Pengambilan Sampel. Data bersumber dari data sekunder yang diperoleh dengan dokumentasi. Data yang telah disusun, dibuat, atau beberapa telah dipublikasikan oleh Dinas Pariwisata Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang telah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam laporan kemudian diukur dengan standar yang telah ditetapkan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah rencana anggaran, realisasi anggaran, data anggaran belanja langsung, dan realisasi belanja langsung serta data hasil *outcome* program yang ada di Dinas Pariwisata Yogyakarta pada Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Yogyakarta tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018.

Pengukuran Variabel. Mengukur kinerja Dinas Pariwisata Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan *value for money* yang melalui tiga rasio sebagai berikut: Ekonomi terkait dengan bagaimana instansi pemerintahan dapat meminimalisirkan *input primer*/anggaran yang digunakan untuk dirubah menjadi *input sekunder* atau sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan/kegiatan pada suatu program. Ekonomi dilaksanakan untuk menghindari pemborosan. Efisiensi terkait hubungan *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan/*input*. Sesuatu dapat dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* yang diharapkan dengan menggunakan *input* serendah-rendahnya. Dan Efektivitas terkait target yang hendak dicapai (*Outcome*) dengan capaian kerja atau hasil yang sesungguhnya dicapai (*Output*). Sesuatu dapat dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan sehingga, dapat dikatakan jika efektivitas berfokus pada *outcome*.

Alat Analisis Data. Pengukuran ekonomi berupa anggaran yang dialokasikan. Ekonomi adalah perbandingan antara *input* dengan nilai rupiah untuk memperoleh *input*.

$$\text{Ekonomi} = \frac{INPUT}{HARGA INPUT (Rp)}$$

Rumus untuk mencari nilai ekonomi (Mahmudi, 2015):

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input Rencana (Anggaran)}}{\text{Input Realisasi (Capaian)}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi atau pengukuran saat produktivitas dari perbandingan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan *input* sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output*. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja dengan standar belanja.

$$\text{Efisiensi} = \frac{OUTPUT}{INPUT}$$

Rumus untuk mencari efisiensi (Mahmudi, 2015):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Nilai Kinerja Output}}{\text{Nilai Kinerja Input}} \times 100\%$$

Nilai Kinerja *Output* = Realisasi Belanja Langsung

Nilai Kinerja *Input* = Anggaran Belanja Langsung

Pengukuran efektivitas berhubungan dengan hasil yang diharapkan/*outcome* terhadap hasil yang sesungguhnya terjadi/*output*. *Outcome* atau capaian kinerja adalah dampak program terhadap masyarakat.

$$\text{Efektivitas} = \frac{OUTCOME}{OUTPUT}$$

Rumus untuk mencari efektivitas (Mahmudi, 2015):

Efektivitas

$$= \frac{\text{Nilai Kinerja Outcome}}{\text{Nilai Kinerja Output}} \times 100\%$$

Nilai Kinerja Outcome

$$= \frac{\text{Capaian Kinerja Outcome}}{\text{Target Kinerja Outcome}} \times 100\%$$

Atau

Nilai Kinerja Outcome

$$= \frac{\text{Target Kinerja Outcome}}{\text{Capaian Kinerja Outcome}} \times 100\%$$

Teknik Analisis. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data, disusun dan diukur sehingga memberikan hasil dan kesimpulan yang objektif terhadap masalah yang ada mengenai hasil kinerja Dinas Pariwisata Yogyakarta dengan metode pengukuran *Value For Money*.

Berikut kriteria pengukuran ekonomi kinerja keuangan yang dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Kriteria Pengukuran Ekonomi Kinerja

Ekonomi	Kriteria
>100%	Ekonomis
85 s/d 100%	Cukup Ekonomis
65 s/d 84%	Kurang Ekonomis
<65%	Tidak Ekonomis

Sumber: Mahmudi (2015: 111)

Berikut kriteria pengukuran efisiensi kinerja keuangan yang dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Kriteria Pengukuran Efisiensi Kinerja

Efisiensi	Kriteria
<90%	Sangat Efisien
90 s/d 99%	Efisien
100%	Cukup Efisien
>100%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2015: 111)

Berikut kriteria pengukuran efektivitas kinerja keuangan yang dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Kriteria Pengukuran Efektivitas Kinerja

Efektivitas	Kriteria
≥100%	Efektif
85 s/d 99%	Cukup Efektif
65 s/d 84%	Kurang Efektif
≥ 65%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2015: 111)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1

Rasio Ekonomi Kinerja Dinas Pariwisata Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018.

Tahun	Anggaran (Input Rencana)	Capaian (Input Realisasi)	Rasio Ekonomi (%)	Kriteria
2017	34.154.629.960	27.411.319.630	124,60 %	Ekonomis
2018	32.512.888.940	28.609.091.163,34	113,65 %	Ekonomis

Sumber: LKIP Dinas Pariwisata Yogyakarta Tahun 2017 dan tahun 2018

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat hasil perhitungan rasio ekonomi dari

kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018. Pada tahun anggaran 2017 kinerja keuangan Dinas Pariwisata Yogyakarta termasuk dalam kriteria ekonomis karena nilai >100% yaitu sebesar 124,60%. Pada tahun anggaran 2018 kinerja Dinas Pariwisata Yogyakarta masih dapat mempertahankan dalam mencapai kriteria ekonomis dengan nilai 113,79%, walaupun nilai tersebut mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,81%.

Tabel 4.2

Rasio Efisiensi Kinerja Dinas Pariwisata Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018.

Tahun	Nilai Kinerja Output (Realisasi Belanja Langsung)	Nilai Kinerja Input (Anggaran Belanja Langsung)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2017	25.211.875.478	31.185.920.580	80,84%	Sangat Efisiensi
2018	28.555.264.163,82	32.512.888.940	87,83%	Sangat Efisiensi

Sumber: LKIP Dinas Pariwisata Yogyakarta pada tahun 2017 dan tahun 2018

Pada tabel 4.2 menunjukkan persentase dan kriteria rasio efisiensi yang dapat dicapai Dinas Pariwisata Yogyakarta pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018. Pada tahun anggaran 2017 kinerja keuangan Dinas Pariwisata Yogyakarta termasuk dalam kriteria sangat efisien karena angka mencapai 80,84%

termasuk dalam kategori <90%. Pada tahun anggaran 2018 kinerja Dinas Pariwisata Yogyakarta pada aspek efisiensi mencapai hasil 87,83% dan masih termasuk dalam kriteria sangat efisien.

1. Pengukuran dengan rasio ekonomi pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan secara ekonomis. Pada tahun 2017 Dinas Pariwisata dapat menghasilkan angka sebesar 124,60% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 113,65%. Artinya, dalam menjalankan kegiatan pada semua program telah dijalankan tanpa pemborosan/hemat. Penurunan nilai ekonomis dari tahun sebelumnya dapat dikatakan bahwa pencapaian rasio ekonomi pada tahun 2018 kurang berhasil atau Dinas Pariwisata Yogyakarta tidak dapat mencapai nilai yang lebih bahkan tidak dapat mempertahankan nilai dari tahun sebelumnya. Dinas Pariwisata Yogyakarta pada tahun selanjutnya diharapkan lebih meminimalisir biaya-biaya yang seharusnya tidak diperlukan.
2. Pengukuran Kinerja Keuangan Dinas Pariwisata Yogyakarta

dengan rasio efisiensi pada tahun 2017 menghasilkan nilai 80,84% dan pada tahun 2018 menghasilkan nilai 87,83% nilai dari kedua tahun tersebut termasuk dalam kriteria sangat efisien. Peningkatan nilai efisiensi tersebut sama dengan menurunkan kinerja pada aspek efisien dalam menjalankan kegiatan karena, semakin tinggi nilai efisiensi semakin dinilai tidak efisien. Perbandingan hasil kinerja pada rasio efisiensi tahun anggaran 2017 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2018, nilai efisiensi tahun anggaran 2018 hampir mendekati kriteria efisien dari kriteria sangat efisien. Pada rasio efisiensi Dinas Pariwisata Yogyakarta juga perlu meningkatkan kinerjanya dengan menganalisis indikator-indikator didalamnya agar mencapai target setiap tahunnya, karena pada tahun 2018 tidak dapat mengurangi bahkan mempertahankan nilai efisiensi. Pada rasio efisiensi ada dua indikator kinerja yang dilaksanakan, tahun 2017 kedua indikator tersebut dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator jumlah kunjungan wisatawan dari target 5%

teralisasi sebanyak 19,4% dan pada indikator lama tinggal wisatawan dari target 2 hari mencapai target sebesar 2,29 hari. Indikator kinerja pada tahun 2018 ada satu yang tidak mencapai target yaitu indikator lama tinggal wisatawan dari target 2,02 hari dan hanya tercapai 2,01 hari selisih sebesar 0,01 hari. Dengan demikian, Dinas Pariwisata Yogyakarta perlu memperbaiki hal-hal yang mempengaruhi tidak bisa meningkatkan bahkan mempertahankan kinerja pada aspek efisiensi dibandingkan nilai dari tahun sebelumnya. Walaupun pada indikator kinerja lama tinggal wisatawan tidak dapat mencapai target tetapi satu indikator kinerja dapat mencapai target yaitu indikator jumlah kunjungan wisatawan dari target 5% tercapai 5,35% selisih sebesar 0,35.

PENUTUP

Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan *Value For Money*, penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

- (1) Hasil analisis kinerja Dinas Pariwisata Yogyakarta berdasarkan aspek ekonomi:

- a. Dinas Pariwisata Yogyakarta pada tahun 2017 telah menjalankan kegiatan secara ekonomis.
- b. Dinas Pariwisata Yogyakarta pada tahun 2018 telah menjalankan kegiatan secara ekonomis.

(2) Hasil analisis kinerja Dinas Pariwisata Yogyakarta berdasarkan aspek efisiensi:

- a. Dinas Pariwisata Yogyakarta pada tahun 2017 telah menjalankan kegiatan secara sangat efisien.
- b. Dinas Pariwisata Yogyakarta pada tahun 2018 telah menjalankan kegiatan secara sangat efisien.

Keterbatasan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pencarian data yaitu sulitnya pada proses awal untuk meminta izin pengambilan data kepada Dinas Pariwisata Yogyakarta sehingga, mengharuskan beberapa kali untuk terus menanyakan kepada pihak Dinas Pariwisata Yogyakarta.

Saran. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa saran yaitu Dinas Pariwisata Yogyakarta diharapkan setiap tahunnya melakukan penghematan

agar tingkat ekonomis setiap tahunnya mengalami kenaikan tidak mengalami penurunan. Penghematan setidaknya dipertahankan dari tahun sebelumnya atau bahkan ditingkatkan dan diharapkan selalu melengkapi data-data yang penting setiap tahunnya dan selalu memperbaharui data yang di publikasikan.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Makassar: Graha Ilmu.
- Farida, 2018, Arah destinasi [Online]. Didapatkan: <http://www.arahdestinasi.com/travelnews/read/472/pertumbuhan_pariwisata_indonesia-_peringkat_9_dunia.html>[21>Maret 2019].
- Halim, Abdul. 2010. *Analisis Standar Belanja*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor*

- Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Inda, Susanti, 2017, Sindo news [Online]. Didapatkan: <<http://ekbis.sindonews.com/read/1231216/34/kontribusi-pertumbuhan-pariwisata-di-sektor-ekonomi-terbesar-dan-tercepat-15029406482017.html>>[21>Maret 2019].
- Liando, Harry Saputra, David Paul Elia Saerang, dan Inggriani Elim. 2014. “Analisis Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangehe menggunakan metode Value For Money” *Jurnal EMBA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Samratulangi Manado* (September), hal. 1686-1694.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mulyaningtyas. 2018. “Analisis Kinerja Keuangan Kota Mojokerto dengan Pendekatan Value For Money” *Jurnal riset dan akuntansi keuangan PRIVE* (Maret), hal. 1-14.
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014: *Ketentuan Umum dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta, Indonesia.
- Siswanto. 2008. *Metode Penelitian Sastra*. Surakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1990: *Kepariwisataan*. Jakarta, Indonesia.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014: *Pemerintahan Daerah*.
- Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yosef, Leon, Pinsker, 2018, Tribun news [Online]. Didapatkan: <<http://jogja.tribunnews.com/2018/09/18/hingga-juni-total-kunjungan-wisatawan-ke-kota-yogya-hampir-dua-juta-orang.html>>[21>Maret 2019].
- YS Suryantari, Putu Dwi, dan I Gusti Ketut Agga Ulupui. 2016. “Kinerja Dinas Pariwisata Bali Berdasarkan Konsep Value For Money” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (November), hal. 1635-1666.